

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PERMUKIMAN DI KELURAHAN PURUS  
KECAMATAN PADANG BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah  
satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



**MURSYIDAH**

**TM/NIM : 2012/1205820**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2017**



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

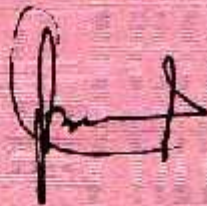
### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN DI KELURAHAN PURUS KECAMATAN PADANG BARAT

Nama : Mursyidah  
TM/NIM : 2012/1205820  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Januari 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D**  
**NIP. 19640208 199003 2 001**

Pembimbing II



**Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D**  
**NIP. 19700212 199802 1 001**



## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas  
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2017 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Judul** : **Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman di Kelurahan Porus Kecamatan Padang Barat.**  
**Nama** : Mursyidah  
**TM/NIM** : 20121205820  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2017

### Tim Penguji

|            | Nama                            |
|------------|---------------------------------|
| Ketua      | Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D |
| Sekretaris | Aldi Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D  |
| Anggota    | Akri Alhadi, S.IP, MA           |
| Anggota    | Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D        |
| Anggota    | Siska Sasmita, S.IP, MPA        |

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.





## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mursyidah  
TM/NIM : 2012/1205820  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2017  
Yang Membuat Pernyataan



MURSYIDAH  
2012/1205820

## ABSTRAK

**MURSYIDAH 1205820/2012 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat.**

Adapun penelitian ini beranjak dari permasalahan mengenai lingkungan permukiman yang ada di Kelurahan Purus yang tidak layak huni dan terkesan kumuh. Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat, (2) untuk mengetahui kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*, dan *Snowball Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi.

Pemberdayaan masyarakat disebut juga sebagai upaya untuk memampukan masyarakat untuk dapat menolong diri mereka sendiri dan terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa program-program bantuan dari pemerintah. Pada tahun 2016 Kelurahan Purus merupakan penerima program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dari siklus program KOTAKU tersebut dapat diketahui bahwa pola pemberdayaan yang dilakukan yaitu *The inner resources approach* yaitu pada siklus program KOTAKU yang pertama Refleksi Perkara Kritis (RPK) di wilayah Kelurahan Purus, siklus kedua yaitu kegiatan pemetaan. Kualitas permukiman yang ada di sepanjang pantai Kelurahan Purus masih sangat rendah dan tidak layak huni. Program pemberdayaan yang dilakukan di Kelurahan Purus nyatanya belum dapat menyelesaikan masalah permukiman yang ada di Kelurahan Purus, sehingga diperlukan evaluasi mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memperhatikan dan menjaga lingkungan permukiman.

**Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Permukiman di Kelurahan Purus**

## KATA PENGANTAR



**Assalammu'alaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat”**. Skripsi ini dikerjakan demi memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Skripsi ini bukanlah akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penguji ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Drs. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku dosen pembimbing I.
2. Bapak H. Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku dosen Pembimbing II.
3. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, Bapak Syamsir, M.Si, Ph.D, dan Ibu Siska Sasmita, S.IP,MPA selaku Tim Penguji.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

5. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang BP 2012.
6. Rekan-rekan “Zubaedas” yaitu Aina Florita, Irma Yulanda, Gita Cloudia, dan Suci Kairun Nisaa yang selalu memberi semangat, motivasi, dan selalu membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Hafizni Syafa yang menemani dalam penelitian dan selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, selain itu saran, kritikan dan perbaikan senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wasaalammu’alaikum Wr.Wb.

Padang, Januari 2017

**MURSYIDAH**  
Penulis

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....           | 6           |
| C. Fokus Masalah .....                  | 7           |
| D. Rumusan Masalah .....                | 7           |
| E. Tujuan Penelitian .....              | 7           |
| F. Manfaat Penelitian .....             | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>          |             |
| A. Kajian Teoritis                      |             |
| 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ..... | 9           |
| 2. Konsep Kualitas Permukiman .....     | 20          |
| B. Kerangka Konseptual .....            | 31          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>        |             |
| A. Jenis Penelitian .....               | 32          |
| B. Lokasi Penelitian .....              | 33          |
| C. Informan Penelitian .....            | 33          |
| D. Jenis dan Sumber Data .....          | 34          |



|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ..... | 35 |
| F. Uji Keabsahan Data .....               | 38 |
| G. Teknik Analisis Data .....             | 39 |

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                        |    |
|------------------------|----|
| A. Temuan Umum .....   | 41 |
| B. Temuan Khusus ..... | 56 |
| C. Pembahasan .....    | 70 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 81 |
| B. Saran .....      | 82 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 4.1 | Luas Daerah Kecamatan Padang Barat menurut Kelurahan Tahun 2015.                    |
| Tabel 4.2 | Mata pencaharian penduduk menurut sektor di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. |

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1      Kerangka Konseptual.
- Gambar 4.1      Peta Kelurahan Purus.
- Gambar 4.2      Struktur Organisasi Kelurahan Purus.
- Gambar 4.3      Kondisi Bangunan Permukiman di RT 02 RW IV Kelurahan  
Purus.
- Gambar 4.4      Kondisi Drainase di RT 02 RW IV Kelurahan Purus.
- Gambar 4.5      Kondisi Kakus di RT 02 RW IV Kelurahan Purus.
- Gambar 4.6      Kondisi Sampah di Kelurahan Purus.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara.                                                                                                            |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Penelitian.                                                                                                       |
| Lampiran 3 | Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Padang. |
| Lampiran 4 | Surat Tugas Dosen Pembimbing.                                                                                                 |
| Lampiran 5 | Surat Izin Penelitian                                                                                                         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena dalam pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Aprilia Theresia, dkk, 2014 : 92-93).

Salah satu bentuk kemiskinan di negara ini dapat dilihat dari bidang perumahan dan permukiman. Dikehidupan manusia, perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman juga berfungsi strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjiwa diri (Aca Sughandy dan Rustam Hakim, 2007: 75-76). Dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Seperti yang

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 1 Tahun 1945 menegaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Disamping itu setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak (UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 Tahun 1999). Untuk hal ini Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5).

Namun kenyataannya masih banyak terdapat perumahan dan permukiman kumuh yang tidak layak huni di Indonesia. Menurut hasil data survei dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, luas kawasan kumuh di Indonesia 38.000 hektar (Detik.com Kamis 1 oktober 2015, diakses 14 Agustus 2016). Pemukiman kumuh merupakan pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pada pasal I angka 13).

Keadaan seperti ini juga terdapat di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014 mengenai Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dengan luas 1,79 Hekta Are (Ha). Kelurahan Purus merupakan salah satu kelurahan di Kota Padang yang relatif

berkembang lebih cepat seiring perkembangan kota. Perkembangan ini terutama karena lokasinya yang cukup strategis, yaitu dekat dengan pusat pemerintahan Kota Padang, berada tepi pantai dan akan di jadikan tempat pariwisata Kota Padang, akan tetapi masih memiliki permukiman kumuh, karena tidak berdayanya mereka untuk memiliki atau membangun perumahan dan permukiman yang layak huni disebabkan perekonomian mereka yang tidak baik.

Hal ini terungkap dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. Tercatat bahwa pada tahun 2015 Kelurahan Purus memiliki luas area 0.68 km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 RW dan 28 RT dengan kepadatan penduduk 11.600 jiwa/km<sup>2</sup> dan sex ratio (%) 103. Jumlah masyarakat di Kelurahan Purus 7.888 jiwa dan 1.634 kepala keluarga (KK), 600 KK di antaranya berstatus keluarga miskin. Selain itu mayoritas penduduk yang bermukim di permukiman Kelurahan Purus bekerja di sektor perikanan dan sektor industri kecil dan rumah tangga. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Purus masih relatif rendah yaitu tamat SD/ sederajat sebanyak 327 orang, tamat SMP/ sederajat sebanyak 232 orang, tamat SMA/ sederajat 601 orang, tamat D3/ sederajat 16 orang, tamat S1 sebanyak 24 orang dan tamat S2 sebanyak 2 orang.

Melihat keadaan perumahan dan permukiman di Kelurahan Purus tersebut Pemerintah Kota Padang sudah melakukan tindakan nyata melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MPk) sejak tahun 2007. Terkait dengan PNPM MPk, pada tahun 2014 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Puruih Saiyo selaku pengelola unit kegiatan PNPM MPk mendapat kucuran dana Rp150 juta. Dana itu dimanfaatkan untuk



memperbaiki jalan lingkungan dan membuat bangunan untuk mandi, cuci, kakus (MCK). Akan tetapi dana tersebut tidak cukup membiayai permasalahan lingkungan permukiman kumuh yang ada.

Terkait dengan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Purus, penulis melakukan wawancara dengan Lisa (28) salah seorang warga di Kelurahan Purus, pada tanggal 15 Agustus 2016. Lisa mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang harus segera diatasi adalah sampah yang ada di sekitar permukiman. Sampah itu tidak hanya berasal dari rumah tangga masyarakat setempat, melainkan juga sampah kiriman dari berbagai daerah di Padang. Selain itu air kumuh yang ada di Bandar Bakali merupakan pembuangan akhir dari beberapa tempat, sehingga Purus terkena imbasnya.

Warga Purus lainnya Helly (49) dan Yurnalis (58) berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan hidup mereka. Warga sudah berusaha memperhatikan kebersihan seperti imbauan pemerintah, namun pemerintah pun terlihat jarang menurunkan petugas secara berkala untuk mengeruk kali.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Aziz selaku ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Purus pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 16:37. Bapak Aziz mengungkapkan bahwa “masih terdapat pemukiman kumuh di wilayahnya, masih banyak yang membuang kotoran dan sampah ke selokan”.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad selaku RW 01 di Kelurahan Purus yang penulis wawancarai pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 16:58, mengungkapkan bahwa “diwilayahnya sering terjadi banjir, hal ini disebabkan oleh luapan dari

bandar yang ada di daerahnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa warga menjadikan bandar tersebut menjadi tempat pembuangan akhir dan juga tempat pembuangan sampah. Beliau juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tempat pembuangan sampah tidak ada di daerahnya, tetapi setiap hari pada pukul 5 becak motor sampah akan datang dan memungut sampah yang diletakkan warga didepan rumahnya”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nursin Husin selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Purus pada tanggal 19 April 2016 pukul 10:00. Beliau mengungkapkan:

”Permukiman kumuh secara bertahap sudah mulai dibenahi. Meski demikian, pada beberapa wilayah Rukun Warga (RW) kondisi pemukiman masih memprihatinkan. Penyebabnya antara lain karena kawasan pemukiman yang sangat padat. Selain itu, juga diperparah oleh drainase permukiman sepanjang pantai yang bermasalah, pemerintah sudah memberikan dana bantuan untuk mengatasinya, akan tetapi dana yang ada tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Masyarakat purus yang sebagian besar nelayan, kurang memperdulikan lingkungan permukimannya. Sebagian warga masih ada yang buang air besar ke kakus tanpa septic tank alias mengalir ke selokan. Akibatnya lingkungan jadi kumuh. Beliau juga mengungkapkan bahwa pada bulan april tahun 2016 ini walikota Padang akan membangun MCK di RW 04 dan dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota padang juga akan mengaspal jalan di Purus I dan di Purus II”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Norman dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 18 April 2016 Pukul 15:02. Beliau mengungkapkan bahwa penataan lingkungan Pemukiman Kumuh merupakan masalah yang kompleks, Program penataan lingkungan permukiman sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Purus, akan tetapi karena

kebiasaan masyarakatnya yang tidak mau mengelola dan merubah kebiasaannya, sehingga membuat permukiman kumuh itu terus ada.

Berdasarkan data dan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa perekonomian dan pengetahuan masyarakat di Kelurahan Purus masih rendah, masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan seringnya terjadi banjir akibat dari luapan bandar yang dijadikan tempat pembuangan akhir serta tempat pembuangan sampah, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat guna merubah pola hidup dan prilaku masyarakatnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami permasalahan di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat”**.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Kelurahan Purus termasuk salah satu lokasi permukiman kumuh di Kota Padang.
2. Kelurahan Purus termasuk penerima dana PNPM-MPK sejak tahun 2007, tetapi ketersediaan sarana dan prasarana masih belum memadai.
3. Masih adanya warga Kelurahan Purus yang membuang sampah sembarangan.
4. Seringnya terjadi banjir akibat dari luapan bandar yang dijadikan tempat pembuangan akhir serta tempat pembuangan sampah oleh masyarakat Kelurahan Purus.

5. Masyarakat Kelurahan Purus mayoritas berprofesi sebagai nelayan, berpenghasilan rendah, dan berpengetahuan rendah membutuhkan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas permukimannya.

### **C. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi diatas, mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahan ini difokuskan kepada “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat?
2. Bagaimana kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat.
2. Untuk mengetahui kualitas permukiman di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara teoritis,**

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

### **2. Secara praktis,**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Kelurahan Purus guna meningkatkan kualitas permukiman.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat untuk meningkatkan kualitas permukimannya.

#### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan penulis dalam pemenuhan tugas akhir skripsi di jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.